

**POLITIK HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Magister Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Muhammad Robbish Thovani

NIM. 02040423010

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Robbish Thovani

NIM : 02040423010

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: **“POLITIK HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA”** adalah karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya yang berakibat pada pembatalan gelar saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 November 2024



Muhammad Robbish Thovani

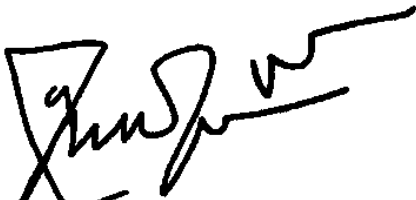
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Robbish Thovani
NIM : 02040423010
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul : POLITIK HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI
INDONESIA PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA

Proposal ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 5 September 2024

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

PEMBIMBING II



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.
NIP. 197911052007011019

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis berjudul "Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia Perspektif Hak Warga Negara" yang telah ditulis oleh Muhammad Robbish Thovani ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 17 Desember 2024.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag. (Ketua Penguji) : 
2. Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si. (Sekretaris Penguji) : 
3. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Penguji 1) : 
4. Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum (Penguji 2) : 

Surabaya, 17 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Suwiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Robbish Thovani
 NIM : 02040423010
 Fakultas/Jurusan : Syariah / Magister Hukum Tata Negara
 E-mail address : mrbhikhu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

POLITIK HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. ROBBISH THOVANI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Mempertimbangkan Hak Warga Negara Indonesia melalui Lensa Politik Hukum Sertifikasi Halal Menjadi Subjek Penelitian Ini. Dengan pertumbuhan ekonomi Islam dan kebutuhan akan barang-barang yang mematuhi kriteria agama, sertifikasi halal telah muncul sebagai perhatian yang signifikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dalam kerangka hukum positif dan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat, khususnya akses konsumen Muslim terhadap barang-barang halal dan perlindungannya. Tesis ini mengkaji aturan dan regulasi sertifikasi halal dan bagaimana mereka mempengaruhi keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dengan menggunakan lensa normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memang meningkatkan keselamatan konsumen, tetapi masih ada kendala untuk menerapkan kebijakan ini, seperti kurangnya pengetahuan publik, infrastruktur yang tidak memadai, dan distribusi sertifikasi yang tidak merata. Itulah sebabnya pemerintah harus meningkatkan dan membuat aturan yang lebih menyeluruh dan efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat Muslim.

Kata kunci: politik hukum, sertifikasi halal, hak warga negara, regulasi.

ABSTRACT

Considering the Rights of Indonesian Citizens via the Lens of the Legal Politics of Halal Certification is the Subject of This Research. With the growth of the Islamic economy and the need for items that adhere to religious criteria, halal certification has emerged as a significant concern. This paper aims to examine the halal certification policy in Indonesia within the framework of positive law and its effects on the rights of people, particularly Muslim consumers' access to halal goods and protection. This thesis examines the halal certification rules and regulations and how they affect economic and social justice for people using a normative-empirical lens. The study results demonstrate that halal certification does improve consumer safety, but there are still obstacles to implementing this policy, such as a lack of public knowledge, inadequate infrastructure, and an unequal distribution of certification. That is why the government should step up and make rules that are more thorough and effective to safeguard the rights of Muslim people.

Keywords: political law, halal certification, civil rights, regulation.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
a. Bahan Hukum Primer	11
b. Bahan Hukum Sekunder	12

c. Bahan Hukum Tersier	12
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
a. Penentuan Bahan Hukum	12
b. Inventarisasi Bahan Hukum	12
c. Pengkajian Bahan Hukum	12
d. Pengolahan Bahan Hukum	13
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II.....	14
KAJIAN TEORI.....	14
A. Teori Politik Hukum.....	14
B. Sertifikasi Halal.....	22
1. Konsep Halal	22
2. Konsep Produk Halal.....	26
C. Konsep <i>Self Declare</i> dalam Sertifikasi Halal	29
D. Hak Warga Negara: Kepastian Hukum.....	35
1. Pengertian Hak Warga Negara.....	35
2. Teori Kepastian Hukum	36
3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum.....	42
4. Asas-asas yang terkandung dalam Asas Kepastian Hukum	44
1. Tujuan Asas Kepastian Hukum	45
2. Akibat Ketidakpastian Hukum.....	47
BAB III.....	50
PERKEMBANGAN REGULASI HALAL DI INDONESIA	50
A. Sertifikasi Halal Sebelum Terbentuknya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	50
B. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan	59
C. Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Kluster Jaminan Produk Halal) Disahkan.....	63

D. Kasus Pelanggaran Sertifikasi Halal Yang Pernah Terjadi di Indonesia	69
BAB IV	73
ANALISIS PEMBAHASAN.....	73
A. Analisis Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia..	73
1. Faktor Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.	73
2. Perubahan Regulasi Sertifikasi Halal	88
3. Mekanisme Sertifikasi Halal.....	92
4. Perubahan Peran BPJPH dan MUI	93
B. Analisis Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia dalam Perspektif Hak Warga Negara.....	97
1. Hak Warga Negara dalam Kewajiban Sertifikasi Halal	97
2. Tantangan Dan Problematika Penerapan Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia.....	99
3. Penegakan Hukum dan Pengawasan Produk Halal	104
BAB V	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran atau Rekomendasi	110
Daftar Pustaka	113

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. "Implementation of Halal Product Guarantee for Micro Enterprises." *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 1 (March 28, 2021).
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulūm Ad-Dīn*. Vol. 2, n.d.
- al-Jurjani, Muḥammad `Ali al-Ḥusaini. *At-Ta`rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003.
- Al-Syaukani, Muḥammad bin `Ali bin Muḥammad. *Fatḥ Al-Qadīr al-Jamī' Li Ahkām Baina Fannai al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min `Ilm Tafsīr*. Vol. 1. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba`ah Muṣṭafa alBali al-Halabi, 1964.
- Aminuddin, Muhammad Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand,," *Jurnal Shahih* 1 (2015).
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 6, 2020): 114–23. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Apriyantono, Anton. *Tanya Jawab Soal Halal*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Arifin, Ridwan. "Legal Analysis of Halal Product Guarantee for Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Business in Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, June 6, 2020, 36–121.
- Artharini, Isyana. "Apakah Kewenangan Sertifikat Halal Dialihkan Dari MUI Ke Kementerian Agama?" <https://www.bbc.com/>, November 24, 2016.
- Black, Hanry Compell. *Black's Dictionary*. St Paul : Wet Publishing, 1991.

Budiardjo, Mariam. *Dasar Ilmu Poltik*. Jakarta : Gramedia, 1982.

Chairunnisyah, Sheilla. "The Role of the Indonesian Ulama Council in Issuing Halal Certificates in Food and Cosmetic Products." *Jurnal EduTech*, 2017, 64–75.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam : Jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dahlan, Abdul Azis, and et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (August 4, 2021): 13–21. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>.

El-Razy, K.M. Ridho, and Romli SA. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Jurnal Muamalah Raden Fatah* 1 (June 2019).

Fuller, Lon L. *The Morality of Law* . (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964.

halal.go.id. "Proses Sertifikasi Halal Reguler," n.d.

Hambali. "Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)." *Jurnal Nurani Hukum* 2, no. 2 (August 15, 2020): 48–61.

Hanifah, Ida. "KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): 193. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.

———. “KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): 193.
<https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.

Hartono, C.F.G Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

Hasan, KN Sofyan. “KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227–38.

Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Heriani, Fitri Novia. “Produk High Risk, UMKM Tak Bisa Gunakan Self Declare Sertifikasi Halal.” <https://www.hukumonline.com/>, March 8, 2024.

Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. “SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKASI NON HALAL PADA PRODUK PANGAN INDUSTRI.” *Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2015).

Hidayat, Asep Syarifudin, and Mustholih Siraj. “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri .” *Jurnal Ahkam* XV, no. 2 (July 2015).

Holijah. “Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.” *Nurani: Jurnal Kajian Syaria“ah Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2015): 1–26.

<https://bpjph.halal.go.id/>. “Wajib Halal Berlaku, BPJPH Berwenang Sanksi Pelanggaran Jaminan Produk Halal,” October 2024.

<https://hukum.uma.ac.id/>. "Ketidakpastian Hukum Dalam Administrasi Negara: Implikasi Dan Strategi Penyelesaiannya," November 28, 2023.

<https://sertifikasihalalindonesia.com/>. "Perbedaan Sertifikasi Halal Self Declare Dan Reguler," October 8, 2024.

Iffan, Ahmad, Raihana, and Asrizal. "ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBAGIAN WILAYAH ZEE DAN LANDAS KONTINEN DI SELAT MALAKA MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF (UNCLOS) 1982 DAN HUKUM NASIONAL." *Jurnal Cahaya Keadilan*, October 2019, 302–20.

Ilyas, Musyfiqah. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, January 9, 2018, 357–76.

Irawan, Fabbiola. "Polemik Sertifikasi Halal, Ini Sederet Masalah Di Baliknya." <https://economy.okezone.com/>, 2019.

Jainah, Zainab Ompu. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)." *Keadilan Progresif* 2 (2011): 123–36.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (July 2019): 13–22.

Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. "Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (April 25, 2022): 26. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>.

- Karimah, Iffah. "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal." *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 1, no. 1 (2018): 107–31.
- kemenag.go.id. "Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori 'Self Declare' ," n.d.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Kusumaatmadja, M., and B. A. Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Vol. 2. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Laritmas, Selfianus, and Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) Jawa Timur. *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*. Surabaya: Lutfiansah Mediatama, 2004.
- LP POM MUI. *Indonesia Halal Directory*. Jakarta : LP POM MUI, 2010.
- . *Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (Halal Assurance System)*. 3rd ed. Jakarta: LP POM MUI, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia. —"Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia," *Dalam Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: PT Erlangga, 2015.
- Ma'luf, Louis. *Munjid Fi Al-Lughah Wa al-A`lām*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum : Studi Perbandingan Dalam Praktek Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta : Prenada Media, 2016.
- Martosoewignjo, Sri Sumantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni Press, 1992.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VI. Jakarta : Kencana, 2010.
- Mashudi. *Konstruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mayo, Henry B. *An Introduction Democratic Theory*. Network: Oxford University Press, 1960.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: UniversitasAtmajaya Yogyakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moho, Hasaziduhu.
 “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta*, 2019.
- Munawwaroh, A. “Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Karakter.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 2019, 141–56.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murjani. “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayyib Di Indonesia Dalam Aspek Yuridis Dan Politis .” *Jurnal Fenomena* VII, no. 2 (2015).
- Muslimah, Salmah. “Data Dukcapil 2024: Islam Agama Mayoritas Di Indonesia, Dianut 245 Juta Jiwa.” kumparanNEWS, August 8, 2024.
- Muslimah, Siti. “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim.” *Jurnal Yustisia*, 2011, 20.

- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negara Barat*. Jakarta : Rajawali Press, 1982.
- Paju, Purwanti. *Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Akademia, 2016.
- Patoni. "BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko Karena Terbukti Lakukan Pelanggaran," August 2, 2024.
- Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran*. Milenium. Vol. 1 & 2. Jakarta: Prenhalindo, 2000.
- Pradicta, Moh Vicky Indra. "Mengevaluasi Jalur Self Declare Sertifikasi Halal." <https://news.detik.com/>, October 17, 2024.
- Qaradhwī, Yusuf. *Ḥalāl Wa Ḥarām Fi Islām*. al-Maktab al-Islami, 1972.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya, 1991.
- Rahayu, Sri. "Mplikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Inovatif* 8 (August 2014): 4.
- Rohman, Abdul. *Pengembangan Dan Analisis Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sartori, Giovanni. *Parties And Party System, A Framework for Analtis* . Cambridge: Cambridge Universities Press, 2005.
- Sayekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 5 (2014).
- . "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (December 2014): 193–209.

- Sedayu, Agung. "Aroma Haram Sertifikasi Halal."
<https://www.tempo.co/>, March 26, 2022.
- Sekretariat DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2003.
- Soedarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Pamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sopa. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika*. Edited by Oneng Nurul Bariyah. GP Press, 2013.
- Stanton, William. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. 7th ed. Vol. 2. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Suparto, Susilowati, Djanurdi, Deviana Yunitasari, and Agus Suwandono. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 427–38.
- Suryowati, Estu. "Inilah Biaya Untuk Bisa Raih Label Halal Dari MUI."
<https://money.kompas.com/>, February 26, 2014.
- Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum*, December 1, 2016.

- Taklima, Musa. "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights." *Dejure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 1 (2021).
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Tim detikcom. "Babak Baru Kasus Manipulasi 'Wine Halal' Mulai Diusut Poisi." <https://news.detik.com/>, September 4, 2023.
- Wahyuni, Sri. "Politik Hukum Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam)." *Mimbar Hukum*, 2003, 35.
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Wajdi, Farid, and Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.